

## **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri” oleh Agryan Pikarsa (B 111 08 431), yang dibimbing oleh Andi Sofyan dan Amir Ilyas.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polrestabes Makassar dan Kantor Polda Sulselbar, pada tanggal 16 Mei – 16 Juni 2012. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan analisis kepustakaan. Terjadinya tindakan represif pihak kepolisian terhadap massa pengunjuk rasa disebabkan oleh faktor adanya penyerangan demonstran terhadap aparat, anggota kepolisian yang tidak mengikuti perintah atasan dan SOP, rendahnya pengetahuan aparat terhadap referensi dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi bagi anggota Polri, pemberian arahan sebelum penugasan, mengutamakan adanya negosiasi, serta pemberian sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran.

### **PENDAHULUAN**

Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah menimbulkan banyak aksi protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak terhadap kepentingan rakyat.

Dalam melakukan aksinya, massa pengunjuk rasa kerap melakukan tindakan yang berlebihan yang mengarah kepada tindakan anarkis seperti menutup jalan, membakar ban, penjarahan serta penyanderaan dan pengrusakan terhadap kendaraan dan sarana umum.

Pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan nasional dituntut untuk melakukan pengamanan dan menghentikan tindakan anarkis massa pengunjuk rasa. Namun dalam melakukan tugasnya, pihak kepolisian kerap bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menggunakan kekerasan guna meredam aksi pengunjuk rasa.

Maraknya tindak kekerasan yang terjadi dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh anggota Polri yang menurut penulis merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas

dinas kepolisian. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan memahami dan mengetahui prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam pengamanan aksi unjuk rasa serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi tindak kekerasan (*represif*) dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sulselbar dan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut yaitu karena penulis ingin mengetahui kesiapan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pengamanan aksi unjuk rasa yang mengarah kepada anarki sesuai dengan masalah penelitian.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer yaitu melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yaitu :

1. Pembuatan rencana pengamanan,
2. Persiapan anggota, yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan,
3. Melakukan pengamanan di TKP. Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa proses pengamanan di TKP dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengamanan yang didasarkan pada tindakan massa pengunjuk rasa, yaitu :
  - a. Zona Hijau
  - b. Zona Kuning
  - c. Zone Merah

Selain itu, dalam SOP tentang Pengendalian Massa Tahun 2012 memuat prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu :

1. Tahap persiapan,
2. Tahap Pelaksanaan,
3. Tahap Pengakhiran.

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan (*represif*) aparat yaitu :

- a. Kurangnya penguasaan diri dari anggota kepolisian,
- b. Adanya anggota yang tidak mematuhi perintah pimpinan dan SOP,
- c. Rendahnya pengetahuan aparat terhadap referensi peraturan pengamanan aksi unjuk rasa.
- d. Massa pengunjuk rasa yang melakukan aksinya tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengganggu ketertiban umum,
- e. Adanya penyerangan massa terhadap aparat.

Upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengurangi kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yaitu pembinaan dan pelatihan

berbasis penanggulangan unjuk rasa anarkis terhadap anggota kepolisian, pemberian sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran baik berupa sanksi administrasi, sanksi disiplin, dan sanksi pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa adalah :
  - a. Membuat rencana pengamanan,
  - b. Persiapan anggota dan pemberian arahan pimpinan,
  - c. Pengamanan yang meliputi 3 zona yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah.
2. Faktor penyebab aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan pengamanan terhadap massa pengunjuk rasa antara lain karena :
  - a. Aksi massa yang tidak sesuai aturan yang berlaku dan mengarah pada tindakan anarkis yang melawan hukum,
  - b. Penyerangan massa terhadap anggota Polri,
  - c. Pengendalian diri yang kurang dari aparat sehingga terpancing melakukan kekerasan,
  - d. Pengetahuan aparat terhadap peraturan penanggulangan aksi unjuk rasa yang masih rendah.
3. Upaya aparat guna mengurangi kekerasan dalam

pengamanan unjuk rasa anarkis yaitu :

- a. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap aparat bertugas dalam aksi unjuk rasa.
- b. Melakukan pembinaan mental terhadap aparat yang bertugas dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
- c. Pemberian sanksi terhadap aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil oleh penulis, maka penulis menyarankan :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia personil Polri dengan mengikuti kursus tentang pengendalian diri.
2. Pemberian sosialisasi tata cara aksi unjuk rasa sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menambah pengetahuan anggota Polri terhadap peraturan penanggulangan aksi unjuk rasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *"Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- A.S. Alam, *"Pengantar Kriminologi"*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005.
- E. Utrecht, *"Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia"*, PT. Balai Buku, Jakarta, 1953.
- HAK Mochammad Anwar, *"Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I"*, Alumni Bandung, 1986.
- Huriodo, *"Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan"*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI.
- Kunarto, *"Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2"*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Lamber Missa, *"Studi kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur"*, Tesis, UNDIP, Semarang, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengendalian Massa*".
- Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis Citra*, Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003.

- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara*
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- SK Kapolri No. Pol. : KEP/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan POLRI
- SK Kapolri No. Pol. : KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
- SK Kapolri No. Pol. : KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri
- Standar Operasional Prosedur tentang *Pengendalian Massa* Tahun 2012
- STR John May Lam, *"The Police Of Briatai"*, Majalah Bhayangkara, *Terjemahan*, Jakarta: Bhayangkara.
- Thomas Santoso, *"Teori Teori Kekerasan"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Topo Santoso & Eva A., *"Kriminologi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Yesmil A. & Adang, *"Kriminologi"*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme\\_dan\\_kekerasan](http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan) (akses tanggal 18 Maret 2012).
- <http://tolak-bhp-mahasiswa-unhas-polisi.html> (akses tanggal 07 Maret 2012).
- <http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/trisakt.html> (akses tanggal 07 Maret 2012).
- <http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.html> (akses tanggal 07 Maret 2012).
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/0543035/jalan.di.uki.diblokir.muacetttdh> (akses tanggal 07 Maret 2012).